

## DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2015*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2015*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2016*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2016*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2017*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2017*
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2017. SPKN (*Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*). Ditama Binbangkum BPK RI.
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga
- Depdagri, Kepmendagri No. 690.900.327,1996
- Eisenhardt, Kathleem. M. 1989. *Agency Theory: An Assesment and Review*. *Academy of management Review*. Vol. 4. Hal 57-74.
- Ghozali, Imam. 2018. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program IBM SPSS 25*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik. Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Institut Akuntan Publik Indonesia. 2011. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat
- Ikhsan, Arfan, dkk 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*, Medan: Madenatera
- Ikhsan, Arfan, dkk. 2016. *Auditing pemeriksaan akuntansi*. Medan: Madenatera

Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). *Theory of the Firm : Managerial Behavior , Agency Costs and Ownership Structure*.

Katalog Peraturan Menteri, Keputusan Menteri Dalam Negeri Tahun 1950 S.D 2011 Dengan Status/Aspek Legalitasnya

Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Yogyakarta: Andi

Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi

Marfiana, Nandhya dan Lulus Kurniasih. 2011. *Pengaruh karakteristik pemerintah daerah dan hasil pemeriksaan audit bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten/kota*. Universitas Sebelas Maret

Masdiantini, P. R., & Erawati, N. M. A. (2016). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kemakmuran, Intergovernmental Revenue, Temuan Dan Opini Audit Bpk Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1150–1182(ISSN: 2302-8556), 1150–1182.

Muflihatin,A'Alimatul. 2016. *Pengaruh Opini Audit, Fungsi Pengawasan DPRD, dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

Noviando, Henanda Bimo. 2015. *Ukuran daerah, tingkat kekayaan daerah, ketergantungan terhadap pemerintah pusat, opini audit dan temuan audit terhadap kinerja pemerintah daerah*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Nugroho, Renas Adi. 2014. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah dan Temuan Audit BPK Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Studi Empiris Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah*. Semarang.Universitas Diponegoro.

Parwanto, E., & Harto, P. (2017). Pengaruh hasil pemeriksaan bpk terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 6(ISSN (Online): 2337-3806), 1–9

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 297*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 *Tentang Dana Perimbangan*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 *Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*

Perwita, Citra. 2010. *The Influence Of Financial Performance To The Level Of Accountability Disclosure Of Indonesia's Local Government*. Tesis Surakarta: Universitas Sebelas Maret

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta

Suharyadi dan Purwanto.S.K. 2016. *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Sumarjo, Hendro. 2010. *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia)*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Tim Litbang Depdagri – Fisopol UGM, 1991

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 *Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara*

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Sekretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 *Tentang Keuangan Negara*

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 *Tentang Pemerintahan Daerah*

Wahab, L. O. A., Rofingatun, S., & Kreuta, B. (2015). Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Jayapura. *Jurnal Keuda*, 2(3), 1–12..